

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NO 93 TAHUN 2014  
TERHADAP AKAD SAMSAARAH PADA “MAKELAR MOTOR” DI  
TAMBAK SUMUR SIDOARJO**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Asri Ayu Wardani**

**NIM. C92215150**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah Dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Surabaya  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Asri Ayu Wardani

NIM : C92215150

Fakultas/Prodi: Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah

Alamat : Jl. Zainal Abidin Desa Tambak Sumur No.06 Rt.6  
Rw.3 Kec. Waru, Kab. Sidoarjo

No HP : 083831696323

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No 93 Tahun 2014  
Terhadap Akad Samsarah Pada "Makelar Motor" Di Tambak  
Sumur Sidoarjo.

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Maret 2019

Sa  
METERAI  
TEMPEL  
TGL. 20  
40474AFF641781497  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
Asri Ayu Wardani  
NIM. C92215150

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Asri Ayu Wardani NIM. C92215150 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 12 Maret 2019

Dosen Pembimbing,

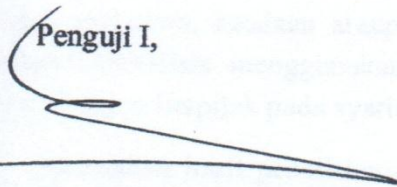
Dr. H. Moh Mufid, LC., M.H.I.  
NIP. 201603306

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Asri Ayu Wardani NIM. C92215150 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 28 Maret 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

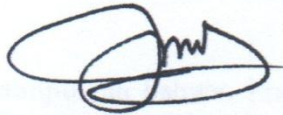
### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



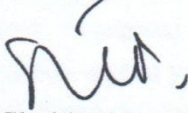
Dr. H. Moh Mufid, LC., M.H.I.  
NIP. 201603306

Penguji II,



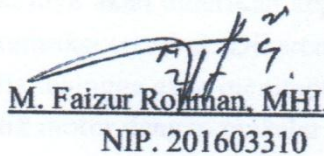
Dr. H. Abd. Basith Junaidy, M.Ag.  
NIP. 1971060520080110026

Penguji III,



Muh. Sholihuddin, MHI.  
NIP.197707252008011009

Penguji IV



M. Faizur Rohman, MHI.  
NIP. 201603310

Surabaya,

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.  
NIP. 195904041988031003





























tidak sah menurut hukum Islam karena bertentangan dengan akad jual beli murabahah, syarat-syarat makelar, Alqur'an dan Sunnah yang mana perjanjian yang dilakukan makelar dengan cara lisan tersebut dapat merugikan pihak si penjual dan si pembeli karena adanya penambahan harga sepeda motor yang dilakukan oleh makelar tanpa sepengetahuan kedua belah pihak yang bertujuan untuk mencari keuntungan yang berlebih dan tidak wajar.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis bahas adalah tentang praktik makelar di dalam analisis hukum islam yang diperbolehkan dan menurut syarat yang berlaku, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan akad jual beli murabahah dan penulis menggunakan akad samsarah dan juga menggunakan analisis menurut Fatwa DSN MUI Nomor 93 tahun 2014 tentang Keperantaraan (*Wasatāh*).

Dari pemaparan ketiga penelitian tersebut disimpulkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu yang pertama hukum yang digunakan bukan hanya hukum Islam tetapi juga menggunakan Fatwa DSN MUI Nomor 93 tahun 2014 tentang Keperantaraan (*Wasatāh*). Kedua, objek yang digunakan yaitu sewa rumah sedangkan yang objek penulis adalah motor. Ketiga, akad yang digunakan yaitu menggunakan akad jual beli *murabahah* sedangkan penulis menggunakan akad *samsārah*. Maka dalam penelitian



















menginterpretasikannya yang kemudian dianalisis dengan pola pikir induktif yang akan digunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum, kemudian setelah itu untuk mengetahui nilai-nilai bentuk kerjasama antar makelar dengan gambaran tentang praktik makelar motor di Desa Tambak Sumur Sidoarjo.

### I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman dan pembahasan terhadap masalah tentang “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 93 Tahun 2014 terhadap Akad *Samsārah* Pada Makelar Motor di Desa Tambak Sumur Sidoarjo”. Maka pembahasannya disusun secara sistematis sesuai urutan dari permasalahan yang ada, yaitu terdiri dari lima bab yang saling terkait.

Dalam bab pertama yaitu **Pendahuluan**, yang dalam bab ini menjelaskan unsur-unsur syarat suatu penelitian ilmiah yaitu dengan sub bab; latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua yaitu **Konsep Akad *Samsārah***. Bab ini merupakan bab kajian teori, dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang konsep akad *samsārah* dalam hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini merupakan Fatwa DSN MUI.

Bab ketiga **Gambaran umum Makelar Motor di Desa Tambak Sumur**. Bab ini merupakan bab yang membahas tentang penyajian data. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan sekaligus menguraikan mengenai hasil penelitian lapangan yang mana berisikan tentang sekilas gambaran umum lokasi penelitian yaitu letak geografis dan demografi, latar belakang terjadinya proses akad *samsarah* pada makelar motor di desa Tambak Sumur Sidoarjo.

Bab Keempat **Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 93 Tahun 2014 terhadap akad *Samsārah* pada Makelar Motor di Desa Tambak Sumur Sidoarjo**. Bab ini adalah bab yang membahas tentang analisis, dimana penulis akan membahas serta menganalisa bab Ketiga tentang gambaran umum, meliputi analisis terhadap praktik pelaksanaan akad *samsārah* pada makelar motor di desa Tambak Sumur Sidoarjo dengan analisis hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 93 tahun 2014 tentang Keperantaraan (*Wasa'ah*), yang berisi tentang akad dan praktik pelaksanaan di lapangan.

Adapun Bab Kelima **Penutup**, merupakan bab terakhir dalam pembahasan skripsi yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan juga selanjutnya memberikan saran-saran penting demi kebaikan dan kesempurnaan penelitian, kemudian ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lainnya.











































































karna dibutuhkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang mengandung unsur transaksi perdagangan, misalnya gadai, sewa, jual beli dan lain sebagainya. Terutama dalam hal ini untuk memenuhi permintaan para pihak yang membutuhkan sewa motor dalam jangka waktu yang tidak dapat dipastikan.

### **C. Praktik Perjanjian Sewa Motor Oleh Makelar Di Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo**

Sekarang ini kebutuhan masyarakat semakin banyak yang menuntut untuk memenuhinya, di samping itu juga dengan semakin bertumbuhnya kebutuhan masyarakat pada zaman sekarang ini yang membuat masyarakat berupaya untuk berusaha mendapatkan uang guna melangsungkan kehidupan. Namun demikian masyarakat selain bekerja mereka juga membutuhkan barang dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Masyarakat Desa Tambak Sumur banyak yang berprofesi sebagai karyawan/karyawati dan juga pedagang. Namun demikian tidak menjamin kebutuhan hidup masyarakat tersebut dapat terpenuhi seutuhnya. Banyak dari mereka yang juga membutuhkan bantuan dari orang lain untuk melangsungkan kehidupannya.

Sekarang ini kebutuhan akan kendaraan bermotor terasa sangat dibutuhkan setiap waktunya. Dan selalu mengalami jumlah peningkatan dari hari ke hari yang mengakibatkan banyaknya masyarakat yang mencari kendaraan tersebut atau motor untuk menjalankan aktifitasnya



Transaksi ini terjadi dengan adanya perjanjian, subyek dari perjanjian perantara ini adalah para pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa menyewa dan juga seorang perantara atau makelar. Pihak yang menyewakan bisa perorangan atau badan hukum tetapi dalam hal ini yang lebih sering terjadi adalah perorangan yang akan menyewakan kepada pihak penyewa, sedangkan pihak penyewa adalah bisa perorangan atau badan hukum.<sup>34</sup> Selain itu, dalam hal transaksi ini terdapat objek, artinya yang menjadi objek dalam perjanjian ini adalah benda atau jasa dan harga. Dengan syarat benda atau jasa dan harga yang digunakan dalam transaksi adalah halal, artinya tidak bertentangan dengan undang-undang ketertiban dan kesusilaan.<sup>35</sup>

Sebagaimana penjelasan di atas, bahwa mayoritas penduduk Desa Tambak Sumur adalah karyawan atau karyawan dan juga pedagang, tetapi tidak sedikit juga profesi dalam bidang jasa yaitu makelar. Seperti yang dilakukan oleh Bapak Samsul Hadi dan Bapak Imam Khanafi yang mana dalam hal ini lebih dari satu kali melakukan transaksi dengan melalui makelar yaitu sebagai pihak yang mencari atau menyewa motor kepada Bapak Abdul Khafid yang mana di sini sebagai pihak perantara atau makelar. Selain itu masih banyak pihak makelar yang terdapat di Desa Tambak Sumur bukan hanya Bapak Abdul Khafid, tetapi juga

---

<sup>34</sup> Salim, *Hukum Kontrak Teori Dan Tehnik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 59.

<sup>35</sup> Dalam hal ini yang menjadi objek dalam perjanjian adalah motor dan harga. Dengan syarat motor yang disewakan adalah motor yang halal, artinya tidak bertentangan dengan kesepakatan., Ibid.





tidak dijelaskan berapa lama waktu yang digunakan oleh Bapak Abdul Khafid untuk mencarikan motor dan juga Bapak Samsul Hadi tidak mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan sewa motor tersebut tetapi dalam perjanjian mereka berkata dengan waktu secepatnya, setelah melakukan perjanjian transaksi tersebut maka tugas Bapak Abdul Khafid adalah mencarikan motor kepada pihak yang akan menyewakan motornya dengan alasan membutuhkan uang.

Setelah mereka melakukan perjanjian antar pihak, maka pihak penyewa di sini adalah Bapak Samsul Hadi tidak mengetahui besaran nilai harga yang akan dikeluarkan untuk menyewa motor, karena Bapak Abdul Khafid sebagai makelar juga tidak memberi tahu terlebih dahulu harga yang akan digunakan untuk transaksi tersebut.

Setelah Bapak Abdul Khafid mendapat motor yang diminta oleh Bapak Samsul Hadi dari pihak lain, maka Bapak Abdul Khafid menentukan harga yang diminta oleh pihak yang menyewakan motornya kepada Bapak Samsul Hadi. Dengan begitu Bapak Samsul Hadi tidak mengetahui dengan jelas harga asli yang diminta oleh pihak yang menyewakan motor. Disini terdapat perjanjian sebelah pihak atau perjanjian yang tidak diketahui oleh semua pihak.

“Saya tidak mengetahui harga sebenarnya yang diminta oleh pihak yang akan menyewakan motor ini, karena saya tidak bertemu langsung dan saya mendapatkan motor ini melalui Bapak Khafid sebagai makelar tersebut. Jadi saya membayar dengan harga yang sudah ditetapkan oleh Bapak Khafid, tidak tahu juga itu harga asli dari yang diminta oleh pemilik motor atau tidak yang penting saya dapat motor dan uang saya kembali









dan kewajiban dari apa yang diadakan tersebut. Perjanjian yang dilakukan oleh seorang perantara atau makelar ini merupakan perjanjian secara lisan, yang mana pihak perantara atau disebut dengan makelar akan menemui pihak yang akan melakukan transaksi dalam hal ini adalah melakukan sewa motor. Antara pihak makelar dengan pihak pemilik sepeda motor (*pemilik motor*) terdapat hubungan kerja yang mana berdasarkan perjanjian, yang memiliki unsur pekerjaan, dengan begitu makelar dengan pemilik sepeda motor (*pemilik motor*) akan menimbulkan adanya suatu hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, baik dari pihak makelar maupun dengan pihak pemilik sepeda motor (*pemilik motor*).

Sistem akad atau perjanjian yang dilakukan oleh makelar, pihak pemilik sepeda motor (*pemilik motor*) dan pihak yang akan menyewa motor ini merupakan satu unsur yang harus dipenuhi oleh para pihak karena perjanjian ini dalam lingkup pekerjaan. Tetapi perjanjian ini tidak ada hitam di atas putih atau tidak tertulis sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Para pihak hanya menyebutkan apa yang dibutuhkan dan yang harus dilakukan secara lisan. Seperti melakukan perjanjian jangka waktunya yang hanya disebutkan oleh para pihak, harga sewa motor atau uang yang harus dibayarkan oleh penyewa motor dan upah yang akan diterima oleh makelar semua tergantung kesepakatan atau perjanjian dari masing-masing pihak.



































- Khafid, Abdul. *Wawancara* Tambak Sumur. 16 November 2018.
- Khanafi, Imam. *Wawancara* Tambak Sumur. 16 November 2018.
- K.Lubis, Chairuman Pasaribu Suhrawardi. *Hukum Gadai dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 1996.
- Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Desa Tambak Sumur tahun 2017.
- Narbuko, Chalid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 1997.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 2005.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.
- Majelis Ulama Indonesia, Dewan Syariah Nasional- *National Sharia Board – Indonesian Council of Ulama*. Jakarta : Fatwa DSN MUI. 2014.
- Mujtaba, Saifuddin. *Masā'ilul Fiqhīyah*. Rousyan Fiqr: Jombang. 2007.
- Pola Jihad Fatwa DSN MUI, *dalam <http://repository.uinsu.ac.id/304/>*. Diakses pada 08 Oktober 2018.
- Prastowo, Andi Prastowo. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2014.
- Ramlan, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 64*. Malang: Setara Press. 2016.
- Sabbiq, Sayyid., *Fiqh Sunnah*. Bandung: Al-Ma'rif. 1997.
- Salim. *Hukum Kontrak Teori Dan Tehnik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika. 2003.
- Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2004.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Suyono, *Wawancara* Tambak Sumur, 17 November 2018.
- Syarbini (Asy), Muhammad. *Mugni Al-Muhtāj, jilid II*. Beirut: Dar al-Fikr. 1994.

